Pontianak Post • Sabtu 1 Oktober 2011

Opini Tidak Wajar Sering Dipolitisasi

YOGYAKARTA—Pertanggungjawaban keuangan daerah yang opininya dikeluarkan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sering dijadikan ajang politisasi lawan politik kepala daerah. "Karena opini tersebut kepala daerah atau bupati sering kewalahan menghadapinya," kata Sujiwo Ketua DPRD Kubu Raya seusai mengikuti PSDM di Yogyakarta, Jumat siang. Menurutnya yang paling krusial adalah ketika BPK RI menyatakan keuangan daerah disclaimer opinion (tidak memberikan pendapat) bahkan hingga kepada adverse opinion (tidak wajar), maka akan terbuka peluang dimanfaatkan. "Berbagai opini langsung terbentuk di mata masyarakat kalau kepala daerah tidak mampu mengelola keuangan daerah ketika menjalankan amanah masyarakat," kata dia.

Kebalikannya adalah ketika opini yang diberikan BPK RI berupa unqualified opinion (wajar tanpa pengecualian) dan wajar dengan pengecualian (qualified opinion), masyarakat menilai kepala daerah mampu mengelola keungan daerah. Kondisi ini kalau terus disandarkan kepada kepentingan politik tertentu tentunya akan menjadi preseden buruk bagi proses pembangunan daerah. "Perlu sikap arif dan bijak dalam menyikapi opini BPK RI, sehingga tidak menjadi polemik baik dari sisi politis ataupun pini masyarakat," ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Kubu Raya.

Terpisah Atjep Mulyadi narasumber dari BPK RI menyampaikan permasalahan yang kerap mempengaruhi opini adalah belum adanya inventarisasi dan penilaian aset tetap. Kebanyakan penyajian piutang tidak didukung bukti dan SPPD fiktif sehingga terjadi ketekoran pada kas.

Makanya bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan pada PP 24 tahun 2005. "Kalau amanah tersebut dijalankan, saya optimis tidak ada lagi temuan dari BPK-RI," ujarnya. ***(den)***

BIMTEK: Pimpinan dan Anggota DPRD Kubu Raya berfose bersama seusai mengikuti bimtek pengelolaan keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.